

ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA ANTARA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN OPINI *DISCLAIMER*

Indriyani

Email : indriyanip2cd11010@gmail.com

Luthfiana Tarida

E-mail: luthfianataridawibis@gmail.com

Akademi Maritim Nusantara Cilacap

ABSTRACT

UU No. 17 of 2003 states that financial statements must be audited by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Based on Reports on Audit Results of the Central Government Finance Report of the Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) in 2015 got a WTP opinion and decreased in 2016 the KKP obtained a disclaimer opinion because goods shopping was 209 billion vessels, of which 756 new units were realized 48 units. Based on the differences in opinion, the purpose of the study is to analyze the differences in financial performance of the KKP between those who get WTP opinions and opinions of disclaimers.

This type of research is a causal-comparative study with a sample of data from the KKP's financial performance report on WTP opinions and disclaimer opinions. Data analysis was performed by Mann Whitney test using SPSS software.

The results of the descriptive statistics calculation show that the financial performance of the KKP which got the WTP opinion with a performance score of 6.0678 was higher than the one who got the disclaimer opinion with a performance score of 4.37307. However, the significance of the financial performance of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) on WTP opinions is no different and no better than those who have a disclaimer opinion. This is concluded based on the Mann Whitney test results where the Asymp value. Sig. (2-tailed) = 0.631 ≥ 0.05.

Keywords: KKP Financial Performance, WTP opinion, disclaimer opinion

A. LATAR BELAKANG

Menurut PMK 177/PMK.05/2015 laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada kementerian meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan pernyataan telah direview dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas

Intern dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh menteri sebagai pengguna anggaran.

Era reformasi di Indonesia terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek keuangan. Pada reformasi pengelolaan keuangan ditandai dengan munculnya Undang – Undang No. 17 tahun 2003, UU No.1 tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2004. UU RI tersebut menuntut pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dalam lima tahap yaitu perencanaan dan penganggaran;

pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; pengawasan internal; pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen.

UU No. 17 tahun 2003 menyatakan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan, memberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan sistem pembukuan, manajemen dan pertanggung jawaban keuangan yang baik dan memberi opini. Opini pemeriksaan BPK diberikan berdasar tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

Opini yang diberikan BPK pada Kementerian yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* dan opini Tidak Wajar (TW). Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikutip detikFinance, Rabu (24/5/2017) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 mendapat opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas) dengan sedikit catatan atas laporan keuangan, meningkat pada tahun 2015 mendapat opini WTP dan menurun pada tahun 2016 KKP memperoleh opini *disclaimer* karena belanja barang yaitu kapal senilai 209 miliar, dimana dari 756 unit baru terealisasi 48 unit. Berdasarkan perbedaan opini dalam kurun waktu tiga tahun ini apakah menyebabkan perbedaan kinerja keuangan KKP.

Menurut Mardiasmo (2011) pengukuran kinerja keuangan

dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara yang mendapatkan opini WTP dengan opini *disclaimer* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara yang mendapatkan opini WTP dengan opini *disclaimer*.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Menurut Ghazali dan Chariri (2007) dalam Khairudin (2013) mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, analis, masyarakat dan pihak lain).

Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan laporan keuangan merupakan suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/ atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas

aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standard akuntansi pemerintah.

Kinerja Keuangan

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi (Putri, 2013).

Opini Audit BPK

Menurut UU No. 15 Tahun 2004 , opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, terdapat empat jenis opini audit yaitu :

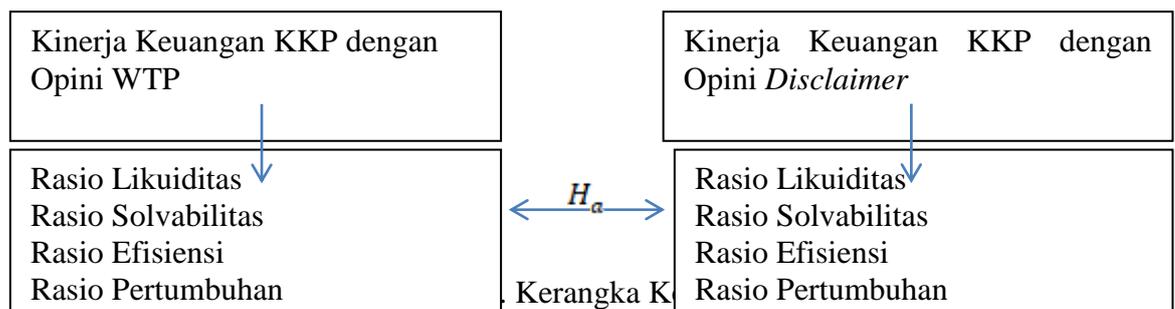
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semu hal yang material ,

posisi keuangan , hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
Menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal – hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan atau untuk pos – pos tertentu disajikan secara tidak wajar.
3. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)
Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*)
Opini yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Kerangka Konseptual

Dari latar belakang permasalahan yang sudah diajukan, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairudin (2013) dengan judul *Does Financial Performance of Local Government Influence On The Audit Agency Opinion ?*. Penelitian tersebut memberikan satu kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP berbeda dan lebih baik dengan yang menerima non_WTP tahun anggaran 2011. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 2,73% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP; efektifitas keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 4,62% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP; efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 0,54% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP; dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP secara prosentase lebih tinggi sebesar 5,09% dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini non_WTP. Walaupun secara persentase pebedaannya tidak terlalu besar, namun hasil pengujian statistika menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penelitian oleh Khairudin membahas tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian tersebut menguji perbedaan kinerja keuangan berdasarkan empat opini audit. Pada penelitian yang akan dilakukan, akan dibahas tentang kinerja keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khusus membahas opini WTP dan *disclaimer*.

E. HIPOTESIS

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis perbandingan kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada opini WTP dan *disclaimer*. Analisis tersebut untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan KKP yang mendapat opini WTP dan *disclaimer*. Jika ada perbedaan, maka akan dianalisis lebih lanjut, lebih baik kinerja keuangan KKP yang mendapat opini WTP atau yang mendapat opini *disclaimer*, dan sebaliknya.

Kinerja keuangan KKP dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Semakin baik kinerja keuangan KKP, maka ukuran keberhasilan pekerjaan semakin baik. Menurut UU No. 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis opini audit yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*); (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*); (3) Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*); (4) Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada opini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang memiliki opini *disclaimer*.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal-komparatif yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat, tidak dengan jalan eksperimen tetapi dilakukan dengan pengamatan

terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian yaitu Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sampel Penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tahun 2015 – 2016.

3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro :2003: 127). Adapun metode perolehan data adalah dengan memperoleh secara langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang beralamat di Jakarta.

4. Definisi Operasional Variabel

Dalam menilai kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penelitian ini menggunakan parameter yaitu rasio keuangan. Menurut Gumanti (2007) terdapat beberapa klasifikasi rasio yaitu :

a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan tingkat kelancaran suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari :

Current Ratio

Current Ratio (Rasio lancar) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan entitas untuk membayar hutangnya yang segera harus dipenuhi menggunakan aset lancar. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Current Ratio = \frac{Aset Lancar}{Kewajiban Jangka Pendek} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *current ratio* adalah semakin tinggi nilai *current ratio* dapat diartikan bahwa entitas memiliki kemampuan pembayaran hutang yang semakin besar.

$$Cash Ratio = \frac{Kas}{Kewajiban Jangka Pendek} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *cash ratio* adalah semakin tinggi nilai *cash ratio* dapat diartikan bahwa entitas memiliki kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia

b. Rasio Solvabilitas atau *leverage Ratio*

Rasio yang memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan hutang entitas artinya seberapa besar porsi hutang yang ada di entitas jika dibandingkan dengan modal atau asset yang ada.

Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Asset Ratio atau Rasio Total Hutang (Kewajiban) terhadap Asset adalah perbandingan antara jumlah total hutang dengan total asset

$$DAR = \frac{Total Hutang}{Total Aset} \times 100\%$$

Adalah rasio yang memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan hutang entitas artinya seberapa besar porsi hutang yang ada di entitas jika dibandingkan dengan modal atau asset yang ada.

c. Rasio Efisiensi

Menurut Hamzah (2008) Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan. Kriteria rasio Efisiensi adalah semakin kecil

rasio ini, maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Rasio efisiensi dengan nilai di atas 100% tidak efisien, 90,01% - 100% kurang efisien, 80,01% - 90% cukup efisien, 60,01% - 80% efisien, di bawah 60% sangat efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rasio Pengeluaran}}{\text{Rasio Penerimaan}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2012) dalam Pramono (2014) Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing – masing komponen pendapatan dan belanja sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan } t_1 - \text{Pendapatan } t_0}{\text{Pendapatan } t_0} \times 100\%$$

5. Teknik Analisis Data

Uji Prasyarat Analisis Data

Uji prasyarat analisis data penelitian merupakan prasyarat untuk melakukan uji analisis lebih lanjut menggunakan statistik parametrik. Jadi sebelum melakukan uji analisis statistik parametrik, terlebih dahulu melakukan uji prasyarat. Uji prasyarat analisis data meliputi uji normalitas, uji homogenitas variansi.

Uji Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pertama-tama data yang diperoleh pada penelitian

ini dilakukan analisis statistik deskriptif, dengan menghitung rerata dan simpangan baku dari masing-masing kelompok data, disertai beberapa tabel sehingga suatu gambaran umum diperoleh.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan KKP yang mendapat opini WTP dan *disclaimer* dengan hipotesis berikut :

H_0 : Kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada opini WTP tidak berbeda secara signifikan dan tidak lebih baik dari yang memiliki opini *disclaimer*.

H_a : Kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada opini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang memiliki opini *disclaimer*.

Data tersebut dianalisis menggunakan uji *t-sample independent* apabila uji prasyarat terpenuhi, data berdistribusi normal dan variansinya homogen. Jika uji prasyarat tidak terpenuhi, maka digunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji *Mann Whitney*.

Dasar pengambilan keputusan dari uji hipotesis pada taraf signifikansi **0,05** atau tingkat kepercayaan **95%**, yaitu dengan cara melihat nilai signifikansi (*Sig.*) hasil output *software SPSS* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai (*Sig.*) $\leq 0,05$ maka (H_0 ditolak)
2. Jika nilai (*Sig.*) $> 0,05$ maka (H_0 diterima)

G. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Deskripsi kinerja keuangan KKP dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Deskripsi Kinerja Keuangan KKP pada Opini WTP dan *Disclaimer*

| No | Kinerja Keuangan | | WTP | <i>Disclaimer</i> |
|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Rasio Likuiditas | <i>Current Ratio</i> | 47,199 | 14,328 |
| | | <i>Cash Ratio</i> | 1,135 | 0,286 |
| 2 | Rasio <i>Solvabilitas</i> | Rasio <i>Solvabilitas</i> | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Rasio Efisiensi | Rasio Efisiensi | 47,83 | 11,71 |
| 4 | Rasio Pertumbuhan | Rasio Pertumbuhan Pendapatan | -0,358 | 0,1854 |
| | | Rasio Pertumbuhan Belanja | 0,581 | -0,301 |
| Rerata | | | 16,0678 | 4,37307 |

Berdasarkan tabel diperoleh hasil secara deskriptif bahwa rerata kinerja keuangan KKP yang mendapatkan opini WTP lebih besar dibandingkan yang mendapat opini *disclaimer*. Empat dari enam rasio kinerja keuangan menunjukkan rerata yang lebih besar pada opini WTP dibanding opini *disclaimer*. Sedangkan dua dari enam rasio kinerja keuangan memiliki rerata lebih kecil pada opini WTP dibanding opini *disclaimer*, yaitu pada rasio *solvabilitas* dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Rerata kinerja keuangan KKP yang mendapatkan opini WTP yaitu 16,0678, sedangkan yang mendapatkan opini *disclaimer* memiliki rerata kinerja lebih rendah sebesar 4,37307. Berdasarkan rerata tersebut dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa kinerja keuangan KKP yang mendapatkan opini WTP lebih baik dibandingkan yang mendapatkan opini *disclaimer*.

Uji Prasyarat

Tabel 2
Hasil Uji *Mann Whitney*

| Variabel | <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | Rerata opini WTP | Rerata opini <i>Disclaimer</i> |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Kinerja Keuangan | 0,631 | 16,0678 | 4,37307 |

Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* memberikan hasil bahwa nilai $(Sig.) = 0.04 < 0.05$, berarti H_0 ditolak. Kesimpulannya, seluruh data kinerja keuangan KKP yang mendapat opini WTP dan *disclaimer* merupakan sampel yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Uji homogenitas memberikan hasil bahwa nilai $(Sig.) = 0.01 < 0.05$, berarti H_0 ditolak. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa seluruh data kinerja keuangan KKP yang mendapat opini WTP dan *disclaimer* memiliki variansi yang tidak homogen.

Uji *Mann Whitney*

Uji *Mann Whitney* digunakan karena data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki variansi yang tidak homogen. Hasil uji *Mann Whitney* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = $0.631 \geq 0.05$, H_0 diterima. Hal ini berarti kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada opini WTP tidak berbeda secara signifikan dan tidak lebih baik dari yang memiliki opini *disclaimer*.

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini *disclaimer* menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas hasil audit laporan keuangan karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa opini *disclaimer* merupakan tingkat opini yang paling rendah dalam audit kinerja keuangan sedangkan opini WTP merupakan tingkat opini yang paling tinggi.

Secara deskriptif disimpulkan bahwa rerata kinerja keuangan KKP yang mendapat opini WTP lebih besar dibanding *disclaimer*, yang artinya kinerja keuangan KKP pada opini WTP lebih baik dibanding *disclaimer*. Namun berdasarkan hasil uji signifikansi, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan KKP antara yang mendapat opini WTP dan *disclaimer*. Jadi pada semua populasi kinerja keuangan KKP, tidak berlaku bahwa yang mendapat opini WTP akan lebih baik dibanding opini *disclaimer*.

H. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diperoleh bahwa

kinerja keuangan KKP yang mendapatkan opini WTP dengan rerata kinerja 6,0678 lebih tinggi dibanding yang mendapatkan opini *disclaimer* dengan rerata kinerja 4,37307. Namun secara signifikansi kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada opini WTP tidak berbeda dan tidak lebih baik dari yang memiliki opini *disclaimer*.

Saran

Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih detail tentang penyebab tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang mendapatkan opini WTP dengan opini *disclaimer*. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti penyebab tersebut dan dilakukan tindakan lebih lanjut.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Bagian Penerbitan Salemba Empat
- Dooren, Wouter Van. 2010, Geert, Bouckaert, and John Halligan. *Performance Management in the Public Sector*. Routledge.
- Febriyanto, Iwan Ismi. *Dialektika kebijakan publik : Studi Komparasi Teori New Public Management Dengan Good Governance Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.
- Gumanty, Tatang Ary. *Manajemen Investasi : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jember : Center of Studies. 2007.
- Halim, Abdul. 2001, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat.

- Jensen, Michael C dan Meckling William H.1976. Theory of The Firm Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V.3, No.4,pp 305 – 360.
- Khairudin. 2013. Does Financial Performance of Local Government Influence On The Audit Agency Opinion ?. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 4 No.1 Maret 2013 halaman 33-54.
- Mahmudi. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi.
- Mario Rainer Pangalila. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP dan Disclaimer Yang Ada Di Sulut.
- Munawir, S. 2012. Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7(13).
- Takawalude, Erick H, Parengkuan Tommy, Joubert B Maramis. 2017. Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Pada Opini Disclaimer dan WDP.*Jurnal EMBA*.Vol 5 No 2 Juni 2017.Hal 1802-181.
- Undang – Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/19/pertumbuhan-pdb-perikanan-tertinggi-dalam-5-tahun>
- www.bps.go.id
- www.kkp.go.id
- www.kpu.go.id